

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya **Rencana Kerja** Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disepakati, untuk dijadikan pedoman kerja tahunan guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2025 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi*.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas Dinas Kehutanan tahun 2025.

Jambi, Januari 2024

**KEPALA DINAS**

**AKHMAD BESTARI, S.H.,M.H**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 197405081999031004**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
1. Latar Belakang	.....	1
2. Landasan Hukum	.....	3
3. Maksud dan Tujuan	.....	5
4. Sistematika Penulisan	.....	6
<b>BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2024</b>		
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024	.....	7
2. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	42
3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	43
4. Rancangan Awal RKPD	.....	44
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>		
1. Telaahan Terhadap Kebijakan	.....	49
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	51
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025</b>		
1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025	.....	55
<b>BAB V : PENUTUP</b>	.....	73
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan instansi daerah Provinsi Jambi yang mengurus bidang kehutanan. Potensi sumber daya hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital untuk dipertahankan keberadaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian. Secara garis besar hutan mempunyai fungsi ekologi, fungsi produksi dan fungsi sosial. Agar memperoleh manfaat dari fungsi tersebut, hutan harus dikelola dengan arif dan bijaksana.

Semakin disadari bahwa kelestarian sumber daya hutan merupakan aset dan modal dasar bagi pembangunan Provinsi Jambi. Lebih jauh bahwa upaya pelestarian sumber daya hutan bukanlah hanya demi kelestarian hutan atau alam itu sendiri, namun hakekatnya adalah untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan kesejahteraan manusia. Melihat kecenderungan global dengan berbagai isu strategis baik pada tataran lokal, nasional bahkan internasional bahwa keberadaan hutan dengan berbagai aspeknya pada masa yang akan datang tetap merupakan suatu pilihan.

Seirama dengan adanya pergeseran strategi pembangunan Kehutanan dari *conventional forestry* menuju *Forest Resource and community based Management*. Membedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi* telah menempatkan program optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lingkungan dan rendah karbon dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian daerah.

Jambi sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dengan panorama yang indah dan unik serta kelengkapan diversitas potensi alam juga melengkapi khasanah alam Jambi dengan semboyan “*Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*”. Namun khasanah sumberdaya hutan di Provinsi Jambi tentunya menyimpan tantangan pada berbagai tahapan pengelolaannya. Keadaan ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana sehingga upaya untuk mencapai kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu kenyataan. Permasalahan dan dinamika dalam suatu pengelolaan hutan hendaknya menghantarkan pada suatu kesadaran dan penyadaran tentang pentingnya kelestarian sumberdaya hutan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 adalah  $\pm 2.098.535,00$  Ha atau  $\pm 42,98$  % dari luas daratan di Provinsi Jambi.

Pembagian kawasan hutan di Provinsi Jambi terdiri dari :

a.	Hutan Produksi Terbatas	$\pm 258.285,00$ Ha
b.	Hutan Produksi Tetap	$\pm 963.792,00$ Ha
c.	Hutan Produksi Konversi	$\pm 11.399,00$ Ha
d.	Hutan Lindung	$\pm 179.588,00$ Ha
e.	Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam	$\pm 685.471,00$ Ha

## 2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
- i. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- q. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- r. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- s. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit

Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

- t. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.
- c. Penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

### **4. Sistematika Penulisan**

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2024**

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

### BAB III TUJUAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dijadikan sebagai substansi pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2024. Evaluasi diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi pada kelompok Belanja Langsung.

#### **2.2. Pencapaian Kinerja program /Kegiatan Tahun 2024**

Pada tahun 2024, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp **75.451.123.108,-** yang diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sisi keuangan sampai dengan akhir semester terealisasi sebesar Rp. 61.122.032.407,- (keuangan 93,14%) (fisik 95,95%).

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan 48 **Sub kegiatan** dari 19 **kegiatan** dalam **5 Program** untuk memenuhi Kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi. Terhadap masing-masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah**

**Program Penunjang Urusan Pemerintah** bertujuan agar optimalisasi dalam pelayanan, total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 4.450.751.941,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Realisasi Rp. 4.367.804.829,- atau sebesar 98,13% sedangkan realisasi fisik 100%.

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 332.255.500,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 330.031.497,- atau 99,36%, dengan realisasi fisik sebesar 99,33%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya penyusunan laporan keuangan berupa RKA, RKA-P, LKPJ, LKP dan laporan keuangan lainnya dan monitoring kegiatan bidang kehutanan di 11 KPHP/KPHL di Provinsi Jambi.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 614.541.900,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 612.480.289,- atau 99,66%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan pemenuhan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk mendukung tertib administrasi dan pengelola keuangan, sesuai target kinerja sepanjang tahun 2023.

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 230.911.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 224.457.750,- atau 97,21%, dengan realisasi fisik sebesar 98,70%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi /OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 449.238.074,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 442.526.883,- atau 98,51%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi /OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Kerinci)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 102.041.690,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 99.733.576,- atau 97,74%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Kerinci Unit 1 dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

**6. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bungo)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 106.798.326,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 105.165.540,- atau 98,47%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan diharapkan dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

**7. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Merangin)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 133.295.500,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 130.689.968,- atau 98,05%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI bertujuan menyelenggarakan dan memberikan suatu pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari secara tertib.

**8. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Hulu Sarolangun)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 116.542.728,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 116.270.662,- atau 99,77%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi di perkantoran UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

**9. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Hilir Sarolangun)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 90.161.889,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 88.418.405,- atau 98,07%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun bertujuan agar terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yaitu pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ke tata usahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan serta peralatan kantor.

**10. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tebo Barat)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 58.884.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 55.856.750,- atau 94,86%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo barat Unit IX bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX terpenuhi sehingga penyelenggaraan fasilitas perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

**11. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tebo Timur)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 52.984.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 51.021.900,- atau 96,30%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo Timur Unit X bertujuan agar urusan perkantoran baik yang dilaksanakan seksi-seksi

maupun di Tata Usaha dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran.

#### **12. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Batanghari)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 105.020.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 104.008.065,- atau 99,04%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII bertujuan agar pelayanan administrasi perkantoran yang berkaitan dengan penunjang operasional agar terwujud tertib administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari.

#### **13. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Muaro Jambi)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 76.136.840,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 75.709.083,- atau 99,44%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII bertujuan agar dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya berbagai unsur kebutuhan administrasi perkantoran.

#### **14. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tanjung Jabung Timur)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 78.285.880,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 75.603.575,- atau 96,57%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XIV bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

#### **15. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tanjung Jabung Barat)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 122.054.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 119.868.700,- atau 98,21%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung

Jabung Barat Unit XV,V dan XVI,I bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

**16. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tahura)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 47.130.245,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 46.399.903,- atau 98,45%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD TAHURA bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan ATK, penggandaan, dan keperluan kantor lainnya serta pemenuhan fasilitasi kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam setahun dengan target kinerja 100 %.

**17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 606.518.969,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 606.148.225,- atau 99,94%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertujuan agar terlaksananya program dan kegiatan tersebut kinerja aparatur instansi / OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bahan dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**18. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bungo)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 99.000.000,- atau 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan diharapkan dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

**19. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Merangin)**

Jumlah anggaran sebesar Rp.108.184.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 107.996.800,- atau 99,83%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI bertujuan menyelenggarakan dan memberikan suatu pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari secara tertib.

**20. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Hilir Sarolangun)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 85.710.000,- atau 95,23%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun bertujuan agar terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yaitu pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ke tata usahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan serta peralatan kantor.

**21. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tanjung Jabung Barat)**

Jumlah anggaran sebesar Rp.130.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 129.779.421,- atau 99,83%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,V dan XVI,I bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

**22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)**

Jumlah anggaran sebesar Rp.700.764.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 660.707.258,- atau 94,28%, dengan realisasi fisik sebesar 97,56%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertujuan guna pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor dalam setahun sesuai dengan target kinerja 100%, sehingga pencapaian program memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

## **II. Program Pengelolaan Hutan.**

**Program Pengelolaan Hutan memiliki 18 (Delapan belas) kegiatan bertujuan agar mengoptimalkan pengelolaan hutan di kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 11.698.609.781,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Realisasi Rp. 9.167.265.463,- atau sebesar 78,36% sedangkan realisasi fisik 100%.**

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Jumlah anggaran Rp. 151.930.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 150.432.382,- atau 99,01% dengan realisasi fisik sebesar 100%, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Pembangunan KPHP/KPHL berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Pembinaan ke 2 UPTD KPHP

2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Kerinci Unit I)

Jumlah anggaran Rp. 75.452.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 74.289.000,- atau 100% dengan realisasi fisik Sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :

Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi

3. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)  
Jumlah anggaran Rp. 39.164.796,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 39.164.796,- atau 100% dengan realisasi fisik Sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :
  - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
4. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Merangin Unit IV dan V)  
Jumlah anggaran Rp. 45.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 45.102.000,- atau 99,78% dengan realisasi fisik Sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :  
Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
5. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)  
Jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 38.234.000,- atau 99,57% dengan realisasi fisik Sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :  
Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
6. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)  
Jumlah anggaran Rp. 23.375.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 17.582.000,- atau 75,22% dengan realisasi fisik Sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :  
Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
7. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)  
Jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 38.374.965,- atau 99,93% dengan realisasi fisik Sebesar 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :

Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi

8. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Pada KPHK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)

Jumlah anggaran Rp. 38.400.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 38.400.000,- atau 90,63% dengan realisasi fisik Sebesar 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyusunan pengelolaan KPH. Realisasi kegiatan ini sampai Semester,II yaitu :

Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi

9. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)

Jumlah anggaran Rp. 52.329.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 38.172.472,- atau 72,95% dengan realisasi fisik sebesar 77,74%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pembinaan ke daerah

10. Perencanaan Pengelolaan TAHURA (UPTD Taman Hutan Raya).

Jumlah anggaran Rp. 151.108.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 150.077.985,- atau 99,32% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.

11. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 1.937.701.620,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.845.252.120,- atau 95,23% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi ,koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semeseter II yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali

- b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
12. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV dan V).  
Jumlah anggaran Rp. 2.121.295.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.115.074.456,- atau 99,71% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya pengendalian kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan.  
Realisasi sampai semester II yaitu :
- a. Koordinasi, konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
13. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun).  
Jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.753,- atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya pemanfaatan hutan yang di monitoring.  
Realisasi sampai semester II yaitu :
- a. Koordinasi, konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
14. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun ).  
Jumlah anggaran Rp. 762.660.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 234.084.580,- atau 30,69% dengan realisasi fisik sebesar 30,69%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya pengendalian kerja sama pemanfaatan dikawasan hutan.  
Realisasi sampai semester II yaitu :
- a. Pembayaran honorarium
15. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X).  
Jumlah anggaran Rp. 55.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 51.733.059,- atau 94,06% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK.

Realisasi sampai semester II yaitu :

- a. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan kehutanan sebanyak 1 (satu) kemitraan
- b. Monitoring pemegang izin sebanyak 1 kali

16. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Tanjab Timur).

Jumlah anggaran Rp. 53.200.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 34.800.000,- atau 90,63% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya pemanfaatan dikawasan hutan.

Realisasi sampai semester II yaitu :

- a. Monitoring Pemanfaatan dan Pengembangan hasil hutan sebanyak 2 kali
- b. Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

17. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung ( Tanjab Barat).

Jumlah anggaran Rp. 1.627.735.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 93.105.500,- atau 5,72% dengan realisasi fisik sebesar 6,26%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya pemanfaatan dikawasan hutan.

Realisasi sampai semester II yaitu :

- a. Pembayaran honorarium

- 19 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo)

Jumlah anggaran Rp. 370.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 333.396.070,- atau 90,11% dengan realisasi fisik 92,40%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah

20. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)

Jumlah anggaran Rp. 74.324.800,- yang terealisasi keuangan Rp. 73.269.088,- atau 98,58% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah

21. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 82.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 78.078.114,- atau 95,22% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pembayaran honorarium

22. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)

Jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 18.675.500,- atau 93,38% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

23. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 1.219.458.960,- yang terealisasi keuangan Rp. 1.179.062.642,- atau 96,69% dengan realisasi fisik sebanyak 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar penyelenggaraan peningkatan frekuensi perlindungan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.

- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan.
  - c. Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan
  - d. Melaksanakan cek KTP
  - e. Melaksanakan Penjagaan/ Pengamanan Gudang Barang Bukti
24. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)
- Jumlah anggaran Rp. 227.527.800,- yang terealisasi keuangan Rp.164.469.287,- atau 72,29% dengan realisasi fisik sebanyak 75,25%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.
- Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
  - b. Pelaksanaan patrol pemantauan kebakaran hutan .
25. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)
- Jumlah anggaran Rp. 370.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 333.396.070,- atau 90,11% dengan realisasi fisik 92,40%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.
- Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
  - b. Pelaksanaan patrol pemantauan kebakaran hutan .
  - c. Pembayaran honorarium
26. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)
- Jumlah anggaran Rp. 486.505.000,- yang terealisasi keuangan Rp.482.049.630,- atau 99,08% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya rehabilitasi kawasan hutan yang di kelola.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
- b. Pelaksanaan patroli pemantauan kebakaran hutan .

27. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 213.486.800,- yang terealisasi keuangan Rp.207.546.886,- atau 97,22% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar pemenuhan perlindungan pencegahan kerusakan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 6 kali.
- b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hulu Sarolangun)

28. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 279.119.500,- yang terealisasi keuangan Rp.257.119,320,- atau 92,12% dengan realisasi fisik 94,13%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 14 kali.

29. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)

Jumlah anggaran Rp. 99.929.920,- yang terealisasi keuangan Rp.96.375.000,- atau 96,44% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan dan kebakaran sebanyak 7 kali.

30. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)  
Jumlah anggaran Rp. 75.200.000,- yang terealisasi keuangan Rp.55.932.000,- atau 74,38% dengan realisasi fisik 76,81%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.  
Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pengamanan dan kebakaran sebanyak 5 kali
31. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)  
Jumlah anggaran Rp. 213.379.500,- yang terealisasi keuangan Rp.208.770.825,- atau 97,84% dengan realisasi fisik 98,60%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.  
Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
  - b. Pembayaran honorarium
32. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)  
Jumlah anggaran Rp. 135.339.050,- yang terealisasi keuangan Rp. 132.848.367,- atau 98,16% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.  
Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :
- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
  - b. Pembayaran honorarium
33. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)  
Jumlah anggaran Rp. 250.305.375,- yang terealisasi keuangan Rp. 201.998.054,- atau 80,70% dengan realisasi fisik 81,45%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
- b. Pembayaran honorarium

34. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)

Jumlah anggaran Rp. 701.305.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 607.923.380,- atau 86,68% dengan realisasi fisik 91,52%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 11 kali
- b. Pembayaran honorarium

35. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (UPTD KPHP Kerinci Unit I)

Jumlah anggaran Rp. 126.644.760,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 87.442.000,- atau 69,05% dengan realisasi fisik sebanyak 73,37%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terlaksananya pemanfaatan pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pembinaan terhadap KTH penerima bantuan alat ekonomi produktif.

36. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 92.253.200,- yang terealisasi keuangan Rp. 89.671.437,- atau 97,20% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

37. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 220.280.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 214.481.800,- atau 97,37% dengan realisasi fisik sebanyak 2 izin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya pembinaan pengolahan hasil hutan kayu. Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

38. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)

Jumlah anggaran Rp. 40.200.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 37.483.450,- atau 93,24% dengan realisasi fisik sebanyak 10 kali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring, pemantauan kegiatan IUPHHK.

39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)

Jumlah anggaran Rp. 51.035.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 38.231.500,- atau 74,91% dengan realisasi fisik sebanyak 10 kali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring, pemantauan kegiatan IUPHHK.

40. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)

Jumlah anggaran Rp. 86.701.860,- yang terealisasi keuangan Rp. 86.622.128,- atau 99,91% dengan realisasi fisik sebanyak 5 kali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan hasil hutan kayu.

Realisasi kegiatan ini sampai semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan monitoring izin yang ada di wilayah kelola UPTD.

### **III. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp.1.110.968.949,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mengoptimalkan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.108.300.390,- atau sebesar 99,75% sedangkan fisik 100%.**

1. Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.

Jumlah anggaran Rp.443.361.289,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 442.393.195,- atau 99,72% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Pemeliharaan Kawasan
- b. Koleksi Tumbuhan

2. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA (TAHURA) Provinsi

Jumlah anggaran Rp. 667.607.660,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 665.907.195,- atau 99,75% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga potensi yang dimiliki guna kelestarian sumber daya alam TAHURA.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Pelaksanaan sosialisasi, pencegahan dan penanggulangan pembatasan kerusakan kawasan Tahura.

### **IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan.**

**Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp. 4.224.717.122,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.872.542.972,- atau sebesar 91,66% sedangkan fisik 100%.**

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDm Bidang Kehutanan.

Jumlah anggaran Rp. 1.041.601.722,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.008.183.510,- atau 96,79% dengan realisasi fisik 87,39%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Pemeliharaan Kawasan
- b. Koleksi Tumbuhan

2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 132.927.420,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 116.100.613,- atau 87,34% dengan realisasi fisik 89,28%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS

3. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Bungo).

Jumlah anggaran Rp. 986.793.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 824.608.662,- atau 83,56% dengan realisasi fisik 83,78%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
  - b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
  - c. Pembayaran Honorarium
4. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Merangin).
- Jumlah anggaran Rp. 832.475.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 799.553.300,- atau 96,05% dengan realisasi fisik 97,30%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.
- Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :
- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 2 KUPS
  - b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
  - c. Pembayaran Honorarium
5. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Hulu Sarolangun).
- Jumlah anggaran Rp. 79.576.100,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 79.203.810,- atau 99,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS Blue menjadi KUPS Silver.
- Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :
- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
  - b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
  - c. Pembayaran Honorarium
6. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Hilir Sarolangun).
- Jumlah anggaran Rp. 255.703.500,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 253.114.777,- atau 98,99% dengan realisasi fisik 100% KUPS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan pemerdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.
- Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :
- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

7. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tebo Barat).

Jumlah anggaran Rp. 191.184.360,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 161.315.450,- atau 84,38% dengan realisasi fisik 90,04%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelembagaan dan kemampuan Kelompok Tani Hutan di Lingkup UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

8. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tebo Timur).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 97.306.000,- atau 97,31% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelembagaan dan kemampuan Kelompok Tani Hutandi Lingkup UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- b. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

9. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Batang Hari).

Jumlah anggaran Rp. 110.499.100,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 109.006.750,- atau 98,65% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pendampingan kelembagaan KTH dan bina usaha kelola perhutanan sosial.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

10. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Muaro Jambi).

Jumlah anggaran Rp. 159.559.920,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 154.672.440,- atau 96,91% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada

KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

11. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ( Tanjung Jabung Timur).

Jumlah anggaran Rp. 99.856.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 80.156.800,- atau 80,27% dengan realisasi fisik 84,00%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

b. Pembayaran Honorarium

12. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ( Tanjung Jabung Barat).

Jumlah anggaran Rp. 234.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 189.320.860,- atau 80,73% realisasi fisik 1 KUPS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :

a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

b. Pembayaran Honorarium

#### **V. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

**Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari 1 kegiatan .Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 85.930.800 melalui dana APBD Provinsi Jambi, Realisai Rp. 82.159.900 atau sebesar 95,61%, sedangkan realisasi fisik 100%.**

- a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.  
Jumlah anggaran Rp. 85.930.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 82.159.900,-, Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud pengendalian pengelolaan DAS.  
Realisasi kegiatan ini sampai Semester II yaitu :
  - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
  - b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah
  - c. Pembentukan kelembagaan persiapan Rehabiltasi DAS.

## **II. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 37 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Provinsi Jambi, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan susunan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi ;
  - Tata kesatuan pengelolaan hutan
  - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
  - Pemanfatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan)
  - Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
  - Pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi Jambi
  - Pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi (kurang dari)  $\leq 6000 \text{ M}^3$  /tahun dan
  - Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi ,
- Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
  - Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- d. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- e. Melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- f. Melaksanakan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun.....  
Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Pilihan</b>									
	<b>Bidang Urusan Kehutanan</b>									
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>	<i>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD</i>	<b>0,20</b>		5.970.710.489	5.072.744.483	84,96	<b>0,20</b>		
		<b>Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</b>	<b>1,58</b>		1.242.496.950	-	0,00	<b>1,58</b>		

				<b>Presentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	<b>0,83</b>	<b>-</b>	1.691.752.182	1.204.216.990	71,18	<b>0,83</b>		
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Unit KPHP yang di evaluasi dalam penggunaan kawasan	70		73.103.000	68.610.000	93,85	70		
			Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah identifikasi potensi pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	50		370.176.310	333.423.299	90,07	50		
			Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pemeliharaan dalam rangka rehabilitasi	24		179.695.356	137.296.956	76,41	24		
			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan lahan.	0,83		1.228.358.950	1.153.761.250	93,93	0,83		

				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah lokasi pengecekan potensi HHBK dan pemegang izin HHBK yang di monitoring	20		32.790.000	28.879.000	88,07	20			
				Kegiatan Pelaksanaan Pengeolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Frekuensi rekonsiliasi, sosialisasi dengan wajib bayar di kabupaten penghasil dan bintek untuk operator SIPNBP dan temu usaha	4 UPTD KPHP		120.860.720	107.470.720	88,92	4 UPTD KPHP			
				Kegiatan Perbenihan Tanaman	Persentase pengedar benih yang di fasilitasi	35		45.266.900	5.952.900	13,15	35			
				UPTD KPHP Kerinci	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah pembinaan, monitoring, koordinasi dan sinergitas dengan instansi dan pemangku kepentingan	1 UNIT		115.000.000	100.294.680	87,21	1 UNIT		
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelatihan Pengelolaan HHBK	6 KTH		991.095.350	754.585.950	76,14	6 KTH			
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Frekuensi patroli pemantauan dan pengamanan kebakaran hutan	0,83		65.838.000	54.469.000	82,73	0,83			

UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	64,66	-	-	-	64,66		
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemetaan Potensi Sumber Daya Hutan	-	92.276.000	68.446.000	74,18	-		
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Lokasi Pengadaan Bibit Untuk Kegiatan Agroforestry	30 ha				30 ha		
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase pelaksanaan perlindungan hutan	4 Laporan	75.218.720	66.699.220	88,67	4 Laporan		
UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan	Jumlah unit yang di fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan	-	22.252.250	20.382.750	91,60	-		

			Hutan Konservasi (KPHK)									
			Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah pemegang izin dan pemanfaatan hutan yang di monitoring	35		22.252.250	20.382.750	91,60	35		
			Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kelompok yang dibina dan di fasilitasi sarana produksi (bibit)	4,58		991.095.350	754.585.950	76,14	4,58		
			Kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah patroli dan pengamanan pengendalian kebakaran hutan	32 Kali		69.611.993	68.683.600	98,67	32 Kali		
			UPTD KPHP LIMAU UNIT VII Hulu Sarolangun	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi, monitoring, sinergitas izin peredaran hasil hutan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan hasil hutan yang berlaku	40	74.413.900	67.039.400	90,09	40		

			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase pemenuhan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	0,83		81.129.450	73.397.564	90,47	0,83		
			Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Persentase pembinaan dan monitoring pada pemegang izin	3 KTH		19.601.250	18.556.000	94,67	3 KTH		
			UPTD KPHP LIMAU UNIT VIII Hilir Sarolangun	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi, monitoring ,pembinaan dan sinergitas dengan instansi dan pemangku kepentingan.	50		72.528.720	66.368.029	91,51	50	
			Kegiatan Pelaksanaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-					#DIV/0!			
			Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-					#DIV/0!			
			UPTD KPHP Tebo Timur UNIT X	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	Jumlah monitoring, sosialisasi dan pembinaan peredaran hasil hutan dan PNBP	49		42.420.000	40.811.000	96,21	49	

				Hutan Lindung								
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah pengamanan dan patroli peredaran hasil hutan	0,83		69.326.500	55.297.600	79,76	0,83	
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m3/Tahun	Jumlah izin industri primer hasil hutan kayu yang di bina	50		22.514.000	20.710.000	91,99	50	
			UPTD KPHP Batanghari UNIT XI dan XII	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah luasan demplot agroforestry	53		192.516.326	57.536.100	29,89	53	
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah pelaksanaan patroli pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan	0,83		133.563.000	123.481.300	92,45	0,83	

			Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m3/Tahun	Jumlah frekuensi pembinaan pada pemegang izin	47		29.018.500	25.218.500	86,90	47		
UPTD KPHP Muaro Jambi UNIT XIII			Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah laporan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	0,83		274.086.970	248.047.421	90,50	0,83		
			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah monitoring, evaluasi dan sosialisasi perlindungan hutan	12 Kali		71.902.820	66.258.100	92,15	12 Kali		
			Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m3/Tahun	Jumlah monitoring izin industri yang ada di wilayah kelola UPTD KPHP	60		87.767.940	87.184.940	99,34	60		
UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur UNIT XIV			Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan	Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	-		26.414.202	26.414.202	100,00	-		

				Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	47		39.460.000	35.795.000	90,71	47	
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah pengamanan dan patroli peredaran hasil hutan	0,83		113.485.800	101.884.450	89,78	0,83	
			UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat UNIT XV, VI dan XVII	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	45		32.110.000	29.101.639	90,63	45	
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah patroli dan sosialisasi pengamanan dan perlindungan hutan	0,83		69.566.720	58.120.000	83,55	0,83	

				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah kelompok yang difasilitasi bantuan alat ekonomi produktif di UPTD KPHP	-		65.361.950	57.570.500	88,08	-		
				Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</b>	<b>Persentase pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya</b>		1.086.484.149	1.004.576.890	92,46			
				Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (AppSeEn, M diSx)I CITES (Convension On Internati)	Jumlah Lokasi Perlindungan Taman yang diKelola	11 UPTD KPHP		118.818.157	107.869.700	90,79	11 UPTD KPHP		
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan	Jumlah Lokasi Daerah Penyangga yang di Kelola	55		115.958.000	93.838.000	80,92	55		

				Kawasan Pelestarian Alam								
				Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Patroli Pengamanan di UPTD TAHURA	2 Lokasi		851.707.992	802.869.190	94,27	2 Lokasi	
				<b>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</b>	<b>Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</b>							
					<i>Presentase Luas Izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal</i>	20		1.582.288.810	1.405.869.181	88,85	20	
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Konsultasi dengan Instansi Terkait	41,62		1.153.056.980	1.051.852.326	91,22	41,62	

UPTD KPHP Kerinci UNIT I	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dibina untuk peningkatan kelas	41,46		74.307.100	61.962.200	83,39	41,46		
UPTD KPHP Bungo UNIT II dan III	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatkan Produktifitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial	25,26		41.691.300	50.521.300	121,18	25,26		
UPTD KPHP Merangin UNIT IV, V DAN VI	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dimonitoring dan dibina untuk peningkatan kelas	18,25		22.600.000	22.600.000	100,00	18,25		
UPTD KPHP Limau UNIT VII Hulu Sarolangun	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dimonitoring dan dibina untuk peningkatan kelas	34,73		25.865.260	24.435.260	94,47	34,73		

UPTD KPHP Limau UNIT VII Hilir Sarolangun	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS pada masing-masing pemegang izin perhutanan sosial	32,65		49.506.500	48.701.500	98,37	32,65		
UPTD KPHP Tebo Barat UNIT IX	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan	27,85		15.052.095	11.713.895	77,82	27,85		
UPTD KPHP Tebo Timur UNIT X	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Kelas KUPS	27,85		32.226.200	12.731.000	39,51	27,85		
UPTD KPHP Batanghari UNIT XI dan XII	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi terkait kegiatan Pengembangan Kelembagaan	27,85		28.616.920	22.476.000	78,54	27,85		

UPTD KPHP Muaro Jambi UNIT XIII	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pembinaan Kepada KUPS/Kelompok Masyarakat Terhadap Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan	27,85		48.668.455	41.012.800	84,27	27,85		
UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur UNIT XIV	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang dimonitoring dan dibina untuk peningkatan kelas	27,85		48.186.800	42.912.900	89,06	27,85		
UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat UNIT XV, VI dan XVII	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan BIMTEK	27,85		42.511.200	14.950.000	35,17	27,85		
	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>	<b><i>Presentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk</i></b>	12		132.292.500	126.109.500	95,33	12		

				Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	8 UPTD dan 12 Kelompok		132.292.500	126.109.500	95,33	8 UPTD dan 12 Kelompok	
--	--	--	--	--	---	------------------------	--	-------------	-------------	-------	------------------------	--

Tabel-C30

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

## Provinsi Jambi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana	Dinas	65%	210.000.000	APBD		68%
					Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Dinas)	dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH						

Tabel-C31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah:  
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Lembar.....Dari.....

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>										
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah</b>	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,20%	28.117.003.660	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	<b>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah</b>	0,20%	28.117.003.660	
		<b>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</b>	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	1,58%	-		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	<b>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</b>	1,58%	-	
		<b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,83%	-		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	<b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	0,83%	-	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	UPTD KPHP Kerinci Unit I	65%	530.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	65%	530.000.000	

				Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	64,66%	620.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	64,66%	620.000.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	30%	520.000.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	30%	520.000.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	30%	530.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	30%	530.000.000	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	530.000.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	30%	530.000.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	30%	530.000.000	

				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	30%	530.000.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	491.520.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	30%	491.520.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	30%	530.000.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Dinas Kehutanan	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	30%	530.000.000	
				Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	30%	520.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	30%	520.000.000	

				Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	Dinas Kehutanan	70%	700.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	70%	700.000.000	
				Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	70%	50.000.000	
				Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Dinas Kehutanan	70%	100.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	70%	100.000.000	
				Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Dinas Kehutanan	-	100.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	-	100.000.000	
				Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Limau	Dinas Kehutanan	-	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII	-	50.000.000	

					Unit VII Hulu Sarolangun)					Hulu Sarolangun)			
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50.000.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	-	50.000.000
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	70%	50.000.000
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	70%	50.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	70%	50.000.000
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	70%	50.000.000

				Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Dinas Kehutanan	40%	150.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	40%	150.000.000	
				Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	Dinas Kehutanan	50%	2.413.449.240		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	50%	2.413.449.240	
				Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	UPTD KPHP Kerinci Unit I	7 Lokasi	147.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	7 Lokasi	147.000.000	
				Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147.000.000		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	-	147.000.000	
				Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2.266.000.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	35%	2.266.000.000	

				Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	40%	187.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	40%	187.000.000	
				Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	805.340.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hulu Sarolangun)	50%	805.340.000	
				Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	11%	176.000.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	11%	176.000.000	
				Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	144.739.450		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	49%	144.739.450	
				Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi (UPTD KPHP	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	50%	142.033.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi (UPTD KPHP Batanghari	50%	142.033.000	

					Batanghari Unit XI dan XII)					Unit XI dan XII)			
					Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	75.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	-	75.000.000
					Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	47%	185.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	47%	185.000.000
					Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1.630.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	45%	1.630.000.000
					Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi		997.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	24%	997.000.000

					Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	478.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	478.000.000	
					Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	728.000.000		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	728.000.000	
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58 %	570.500.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	4,58 %	570.500.000	
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70 %	188.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	1,70 %	188.000.000	
					Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (UPTD KPHP Unit VII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	240.200.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (UPTD KPHP Unit VII Hilir Sarolangun)	30%	240.200.000	
					Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	641.500.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	30%	641.500.000	

				Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	643.350.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	55%	643.350.000	
				Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	600.500.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	55%	600.500.000	
				Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	80%	778.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	80%	778.000.000	
				Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	60%	448.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	60%	448.000.000	
				Persentase Penurunan Laju Deforestasi (Dinas)	Dinas Kehutanan	0,83%	4.958.223.000		Dinas Kehutanan	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (Dinas)	0,83%	4.958.223.000	

					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	928.654.250		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	0,83%	928.654.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	831.897.650		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	0,83%	831.897.650	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	981.444.250		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	0,83%	981.444.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0,83%	957.064.250		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	0,83%	957.064.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	838.322.500		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	0,83%	838.322.500	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	588.717.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	0,83%	588.717.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	482.400.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP	0,83%	482.400.000	





				Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	50%	45.000.000	
				Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	47%	61.455.000	
				Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	60%	100.000.000	
				Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas Kehutanan	35%	299.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	35%	299.000.000	
				Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	55%	1.985.000.000		UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang	55%	1.985.000.000	

				tidak dilindungi (UPTD Tahura)					tidak dilindungi (UPTD Tahura)			
				Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	Dinas Kehutanan	55%	300.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	55%	300.000.000
				Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dinas Kehutanan	55%	900.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	55%	900.000.000
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (Dinas)	Dinas Kehutanan	41,62 %	1.229.600.000		Dinas Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (Dinas)	41,62 %	1.229.600.000
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46 %	568.747.355		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	41,46 %	568.747.355

				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26 %	1.470.307.465		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	25,26 %	1.470.307.465	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45 %	1.542.963.865		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	31,45 %	1.542.963.865	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	34,75 %	400.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	34,75 %	400.000.000	
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65 %	1.312.134.400		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir)	32,65 %	1.312.134.400	

				Hilir Sarolangun)								Sarolangun)		
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85 %	680.000.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	27,85 %	680.000.000		
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85 %	310.885.255		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	27,85 %	310.885.255		
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85 %	322.000.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	27,85 %	322.000.000		

					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85 %	450.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	27,85 %	450.000.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	27,85 %	653.285.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	27,85 %	653.285.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	27,85 %	871.983.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	27,85 %	871.983.000	
					Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis (Dinas)	Dinas Kehutanan	8 UPTD dan 12 Kelompok	260.000.000		Dinas Kehutanan	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis (Dinas)	8 UPTD dan 12 Kelompok	260.000.000	

Tabel-C32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Dinas Kehutanan Prov. Jambi</b>	<b>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah</b>	0,20%	
			<b>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</b>	1,58%	
			<b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	0,83%	
			Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	65%	
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	64,66%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin IV, V dan VI	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	30%	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	

			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	30%	
			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	30%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	-	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	-	

			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	70%	
			Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	40%	
			Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	50%	
			Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	7 Lokasi	
			Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	
			Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	
			Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	40%	

			Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	
			Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	11%	
			Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	
			Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	
			Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	
			Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	47%	
			Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	45%	
			Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	24%	
			Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	
			Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	
			Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58%	

			Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70%	
			Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	
			Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	80%	
			Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	60%	
			Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (Dinas)	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0,83%	

			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	0,83%	
			Persentase Penurunan Laju Deforestasi UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	0,83%	
			Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK (Dinas)	20%	
			Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	6 KTH	
			Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 KTH	
			Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	-	
			Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun (Dinas)	45%	

			Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	
			Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	
			Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	
			Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	
			Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	35%	
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>		Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0,2%	
			Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi UPTD Tahura	55%	
			Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	55%	
			Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	55%	

	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>		Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	20%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	41,62%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial	41,62%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	34,75%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65%	

			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85%	
			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Tanjab Barat XV, XVI dan XVII	27,85%	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ALIRAN DAERAH SUNGAI (DAS)</b>		Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	12%	
			Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis	8 UPTD dan 12 Kelompok	

### **III. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum
2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya
3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisata
4. Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang Baik

Dan juga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2016 -2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Meningkatkan tata kelola kehutanan yang bersih, transparan dan akuntabel secara partisipatif
4. Tersedianya ketersediaan data goespasial bidang kehutanan
5. Mewujudkan perlindungan kawasan hutan

6. Mewujudkan tutupan lahan dan kawasan hutan

Berdasarkan capaian prioritas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan capaian prioritas ke-4 yaitu : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **IV. Rancangan RKPD**

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 untuk Dinas Kehutanan tetap mengacu pada prioritas pembangunan kehutanan sebagai berikut :

- a. Pemantapan dan Penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
- c. Restrukturisasi dan revitalisasi industri kehutanan
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan
- e. Perlindungan hutan

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kehutanan maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2021 merencanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan capaian prioritas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan terdiri dari :
  1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konvensional (KPHK).
  2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  3. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara
  4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
  5. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
  6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000m<sup>3</sup>/Tahun.
  7. Perbenihan Tanaman Hutan

8. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPTD KPHP Kerinci Unit I
  9. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPH Kerinci Unit I
  10. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Kerinci Unit I.
  11. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) UPTD KPH Kerinci Unit I.
  12. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.
  13. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
  - 14.
  15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
  16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
  17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
  18. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  19. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di UPTD Tahura
- b. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :
1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL
  2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
  3. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)
  4. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
  5. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
  6. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

7. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
  8. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII
  9. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
  10. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
  11. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
  12. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
  13. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
  14. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
  15. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD Tahura
  16. Pengelolaan hutan kenali
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :
1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  2. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan
  3. Ground Chek Hotspot (Pengecekan titik panas) dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan
  4. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
  5. Pembentukan/pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA)
  6. Pelatihan keteknikan untuk menunjang PLTB
  7. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan
  8. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan
  9. Monitoring dan Evaluasi bekas kebakaran hutan dan lahan
  10. Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan
  11. Monitoring sumber daya manusia dan sarana prasarana kebakaran
  12. Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
  13. Pengamanan batas kawasan hutan dan kawasan hutan

14. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
15. Pemantapan kawasan hutan
16. Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
17. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
18. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneragaman hayati
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI
22. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
23. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII
24. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
25. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
26. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
27. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
28. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
29. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII .
30. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD Tahura

d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.
4. Monitoring pengelolaan DAS

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam hutan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya, tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan di Propinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Aspek terkait Penataan Ruang dan Kawasan* : Adanya konflik kepentingan antara sektor Kehutanan dengan non-kehutanan menjadi muara masalah penataan ruang dan kawasan yang berakibatnya berupa tumpang tindih penggunaan kawasan yang ada.
2. *Aspek pemasaran produk Kehutanan*; Kesenjangan kapasitas industri dengan kemampuan menyediakan bahan baku industri sampai pada permasalahan persaingan harga yang tidak kompetitif antara produksi yang legal dengan bentuk izin lainnya.
3. *Illegal Logging dan kebakaran hutan*; Krisis multi dimensi yang berkepanjangan berdampak pada mata pencaharian masyarakat hingga peningkatan lahan kritis akibat rusaknya kawasan hutan. Keadaan ini semakin diperparah oleh kondisi menjamurnya Industri Primer Hasil Hutan dan izin lainnya serta belum maksimalnya peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan.
4. *Kualitas Hutan yang semakin menurun*; adanya illegal logging dan kebakaran hutan merupakan faktor kuat bagi penurunan kualitas dan potensi sumberdaya hutan.

5. *Masalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; Belum tercapainya pendekatan yang komprehensif serta menyentuh seluruh dimensi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.*
6. *Sumber Daya Manusia Pengelola Hutan masih terbatas, secara kuantitas jumlah polisi hutan, juru ukur, teknisi dan penyuluh kehutanan sangat terbatas, dan secara kualitas keterampilan dan kemampuannya harus ditingkatkan.*
7. *Perubahan Iklim, Isu perubahan iklim saat ini sangat penting dimana Provinsi Jambi adalah termasuk daerah rawan bencana yang di timbulkan oleh alam misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.*

Langkah strategis yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan : melalui pembentukan Tim Terpadu dengan melibatkan multipihak (adat, tomas, polri, TNI, Instansi terkait), sosialisasi / penyebarluasan hasil tata batas kawasan hutan melalui pendampingan/ penyuluhan.
2. Percepatan Pembangunan HTR, HD dan kemitraan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan.
3. Kampanye menanam dan pemberian bibit tanaman kehutanan disetiap even kegiatan kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat guna merehabilitasi kawasan hutan.
4. Patroli Terpadu (pengamanan dan menanam tanaman kehutanan) ; Peningkatan SDM Polhut, Sarpras dan pendanaan pengamanan hutan di daerah serta penyuluhan/ sosialisasi penegakan hukum.
5. Meningkatkan pelayanan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan ; Peningkatan usaha Hutan Tanaman, Hutan Alam dan Hutan Rakyat, fasilitasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

6. Mengantisipasi dampak dari perubahan iklim sedini mungkin dengan cara memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.
7. Bekerja sama dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Rehabilitasi Hutan dan peningkatan ekonomi sekitar hutan

## 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari Program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kinerja/ kegiatan tersebut sebagai suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Pada tahun 2021 terdapat sejumlah kegiatan yang memberi nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2021 mencakup 75 **Sub 17 Kegiatan** dalam 4 **Program** untuk pembangunan kehutanan dan 91 **Sub 2 Kegiatan** dalam 1 **Program** untuk rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan UPTD KPHP guna mendukung 4 **Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan**. Ikhtisar program dan kegiatan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Hutan kegiatan terdiri dari:

- a. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- c. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
- d. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di KPHP Unit XIII Muaro Jambi.
- e. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.
- f. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di KPHP Tebo Barat Unit IX.
- g. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV.
- h. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- i. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Kerinci Unit I.
- j. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Bungo Unit II dan III
- k. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.
- l. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
- m. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
- n. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Tebo Barat Unit IX.
- o. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Tebo Timur Unit X.
- p. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
- q. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XIII Muaro Jambi.
- r. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur.
- s. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XV, XVI, XVII Tanjung Jabung Barat
- t. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- u. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di KPHP Kerinci Unit I.
- v. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.

- x. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
- y. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- z. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kerinci Unit I.
- å. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III
- ä. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Merangin Unit IV,V dan VI.
- ö. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
- aa. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit VIII Hilir Sarolangun.
- bb. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di KPH Tebo Barat Unit IX.
- cc. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di KPH Tebo Timur Unit X.
- dd. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XI dan XII Batanghari.
- ee. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XIII Muaro Jambi.
- ff. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XIV Tanjung Jabung Timur.
- gg. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XV, XVI, XVII Tanjung Jabung Barat
- hh. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- ii. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Kerinci Unit I.
- jj. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
- kk. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Unit VIII Hilir Sarolangun.
- ll. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun.
- mm. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit VIII Hilir Sarolangun.
- nn. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit Tebo Timur Unit X.
- oo. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit XI dan XII Batanghari.
- pp. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit XIII Muaro Jambi.
- qq. Perbenihan Tanaman Hutan.

## **Kebijakan 2**

### **“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan terdiri dari :

1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan /atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade Endangered Species).
2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
3. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)Provinsi

## **Kebijakan 3**

### **“Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan”**

Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan Sumber Daya Manusia bidang Kehutanan.
2. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Kerinci Unit I.
3. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Bungo Unit II dan III
4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.
5. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
7. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Tebo Barat Unit IX.
8. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Tebo Timur Unit X.
9. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XI dan XII Batanghari.
10. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XIII Muaro Jambi.
11. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XIV Tanjung Jabung Timur.
12. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XV,XV,XVI Tanjung Jabung Barat.

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai kegiatan terdiri dari :
1. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) daerah provinsi.

### **3. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### **I. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan terdiri dari :**

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
  - Jumlah unit yang di evaluasi 2 UPTD
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Merangin)
  - Jumlah unit yang di fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan sebanyak 3 unit.
3. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Tebo Barat)
  - Jumlah sosialisasi pengelolaan kawasan kehutanan 1 kali.
  - Jumlah unit yang di fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan sebanyak 1 kali.
4. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Tanjabtim)
  - Jumlah lokasi kawasan unit manajemen yang dipantau pembagian blok atau petak pengelolaan hutan sebanyak 4 lokasi.
5. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Kerinci Unit I

- Jumlah Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan 6 kelompok.
  - Jumlah monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor kehutanan 1 Tahun.
  - Pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus.
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 tahun
8. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
- Pemantauan dan pembinaan pada areal KPHP yang ada ijin 10 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 1 kasus.
  - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
9. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
- Pembinaan dan monitoring pada areal KPHP yang ada ijin 1 Tahun.
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 tahun
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan 2 kemitraan.
10. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VI Hulu Sarolangun
- Pemanfaatan hasil dan PNBP 1 Tahun.
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 Tahun.
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 6 kasus.

- Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
11. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit VIII Hilir Sarolangun
    - Pemanfaatan hasil hutan dan PNBP 1 Tahun
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Laporan dan Data Pemegang Izin di dalam Wilayah kerja UPTD KPHP 1 Tahun.
    - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
  12. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit IX Tebo Barat
    - Pemanfaatan hasil hutan dan PNBP 1 Tahun.
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 Tahun.
    - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus
    - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
  13. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit IX Tebo Timur
    - Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin 16 kali.
    - Jumlah monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor kehutanan 1 tahun.
    - Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus.
    - Fasilitasi kerja sama dan 1 kemitraan
  14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit XI dan XII Batanghari
    - Pemanfaatan hasil hutan 1 tahun
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan
    - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

- Fasilitasi kerjasama dan 5 kemitraan
15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
- Pemanfaatan hasil hutan dan PNBP 1 Tahun
  - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 tahun.
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus
  - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Pemantauan Pemanfaatan hutan 16 kali
  - Pembinaan Perhutanan Sosial 5 lokasi
  - Fasilitasi Pemanfaatan PNBP 5 lokasi
  - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 lokasi
17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
  - Sosialisasi Fasilitasi Izin 3 kelompok
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
18. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di UPTD TAHURA
- Pelatihan budidaya madu 2 kelompok
  - Fasilitasi kerja sama dan 1 kemitraan

## **II. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :**

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL

- i. Jumlah peta geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan sebanyak 1 peta.
  - ii. Dokumen rencana kehutanan tingkat KPHP dan UPTD Tahura sebanyak 1 dokumen
2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan di dinas Kehutanan
  - i. Mengikuti pameran dan update data pembangunan kehutanan pada website 2 kali pameran
3. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
  - i. Jumlah laporan RAD-GRK 1 dokumen
4. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit I Kerinci
  - i. Informasi promosi produk kehutanan 1 kegiatan.
5. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
  - i. Inventarisasi berkala dan penataan hutan 1.647 ha
  - ii. Jumlah perluasan akses informasi dan perpetaan 1 laporan.
6. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
  - i. Jumlah Penyusunan RPHJPD 1 Dokumen
  - ii. Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK 1 Kali.
  - iii. Pameran kehutanan 1 kali.
7. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan.
8. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
  - i. Potensi Kelestarian Hutan yang ada di KPHP 1 Kali.
9. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan.
10. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit X Tebo Timur

- i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan
- 11. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
  - i. Inventarisasi berkala dan pentaan hutan 96,25 ha
  - ii. Fasilitasi Penandaan tanda batas IUPHH Perhutanan Sosial 5 IUPHH PS.
  - iii. Fasilitasi pengecekan hasil cruising pada IUPHH Perhutanan Sosial 3 IUPHH PS.
  - iv. Panjang tingkat penegasan batas luar dan batas blok pada wilayah KPHP 17,60 Km.
  - v. Jumlah peta tematik dan peta areal kerja kphp 12 Lbr
  - vi. Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan kawasan hutan .
- 12. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan
- 13. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
  - i. Pelacakan batas luar kawasan hutan 20 Km
  - ii. Sosialisasi Batas Luar Kawasan Hutan 1 kali
  - iii. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 1 tahun
- 14. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  - i. Jumlah perluasan akses informasi dan perpetaan 1 laporan
- 15. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD TAHURA
  - i. Indeks rasionalisasi wilayah kelola 1 Tahun.

### **III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :**

1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  - i. Monitoring SDM dan Sarpras Pengendalian Karhutla 11 KPHP, 1 TAHURA, 21 Perusahaan Pemegang Izin Konsesi Kehutanan dan 5 Pengelola PS.
2. Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
  - i. Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan dan peredaran Hasil Hutan 20 kali.
  - ii. Rapat koordinasi pengamanan Hutan 18 kali.
  - iii. Pelaksanaan Sosialisasi peraturan TIPHUT 2 kali.
  - iv. Pelaksanaan Pemasangan Papan Larangan TIPHUT (sosialisasi) 10 kali.
3. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
  - i. Pelaksanaan Temu Penyuluh Kehutanan 1 kali
  - ii. Lomba Wanalestari yang terlaksana 1 kali
  - iii. Pembinaan/Monev/Supervisi penyuluhan Kehutanan 11 kali
  - iv. Pelaksanaan kegiatan sekolah lapang yang difasilitasi oleh penyuluh kehutanan 2 kegiatan
  - v. Fasilitasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan 2 kelompok
  - vi. Luas demplot Tanaman Kehutanan yang difasilitasi penyuluh 3 Ha
  - vii. Penyuluh Kehutanan yang terfasilitasi dalam kegiatan temu penyuluh 41 orang penyuluh kehutanan.
4. Evaluasi pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
  - i. Jumlah pemegang IPPKH/ kerjasama penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi pemenuhan

- kewajibannya 2 Pemegang IPPKH/ Kerjasama penggunaan Kawasan Hutan.
- ii. Permohonan ippkh/ Kerja sama Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaksanakan orientasi / Pemeriksaan Lapangannya 2 permohonan IPPKH/ Kerjasama penggunaan Kawasan Hutan.
5. Fasilitasi Penanganan Konflik dalam kawasan hutan
    - i. Jumlah konflik yang diselesaikan sebanyak 6 konflik
    - ii. Pendataan potensi konflik tenurial pada Hutan Adat di Provinsi Jambi 4 Ha di Provinsi Jambi.
  6. Pemantapan Kawasan Hutan
    - i. Pelaksanaan Sosialisasi tata pengelolaan kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan 150 orang.
  7. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneka ragaman hayati di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
    - i. Jumlah identifikasi kawasan esensial 11 KPH
    - ii. Rumah Anggrek 1 Unit
  8. Sosialisasi pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan
    - i. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan terbakar 6 kali
    - ii. Pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar 5 kali
    - iii. Pelatihan pembentukan Masyarakat Peduli Api 2 kali
  9. Groundcheck Hotspot (Pengecekan titik panas) Kebakaran Hutan dan Lahan
    - i. Pelaksanaan Groundcheck Hotspot (Pengecekan titik panas) dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 180 kali
  10. Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

- ii. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan di media sebanyak 4 media
- iii. Apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan 1 kali
- iv. Kaji banding praktek terbaik pencegahan kebakaran hutan dan lahan 1 kali.

#### 11. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

- v. Pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebanyak 27 kali.

#### 12. Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan

- vi. Penyediaan sarana prasarana penunjang pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 unit mobil, 10 unit pompa, 2 unit laptop

#### 13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit I Kerinci

- vii. Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 23 kali
- viii. Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan 1 tahun

#### 10. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit II dan III Bungo

- i. Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
- ii. Koordinasi pengamanan hutan 1 tahun
- iii. Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan 1 tahun.

#### 11. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin

- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 22 kali
- Koordinasi pengamanan hutan selama 1 tahun

- Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
    - Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan selama 1 tahun
    - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 22 kali
  13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
    - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
    - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 15 kali
    - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
  15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
    - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 20 kali
    - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
  16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
    - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 20 kali
    - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan sebanyak 5 kali
  17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
    - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 20 kali
    - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun

18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan selama sebanyak 20 kali
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD TAHURA
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan selama sebanyak 22 kali

#### **IV. Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
  - Pengadaan bibit/benih tanaman kehutanan yang berkualitas 10.000 batang
  - Rumah bibit 1 unit
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
  - IPPKH yang difasilitasi untuk RHL 43 Izin
  - Pengendalian RHL 12 UPTD (KPHP dan TAHURA)
  - Sosialisasi Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi dan Rehab DAS 1 Kali
3. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
  - Lokasi kegiatan monev pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jambi 11 UPTD KPHP

4. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan Tahun I 5 Ha
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 71 Ha
5. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan Tahun I 5 Ha
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 12 Ha
6. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan Tahun I 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 12 Ha.
7. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 12 Ha.
8. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun I 10 Ha dan 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 25 Ha.
9. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
10. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.

- Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
11. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  12. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  13. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  14. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  15. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD TAHURA.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.

## **V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan jasa surat menyurat 8.000 surat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Pembayaran Honor PNS dan Non PNS 75 Orang.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Jasa pihak ke-3 outsourcing cleaning service 1 tahun.
5. Penyediaan alat Tulis Kantor
  - Penyediaan alat tulis keperluan kantor 1 tahun.

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan barang cetak blanko dan fotocopy 1 tahun.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan komponen penerangan kantor 1 tahun.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Penyediaan konsumsi rapat dan tamu 1 tahun.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  - Pelaksanaan perjalanan dinas untuk menghadiri undangan rapat dan koordinasi 1 tahun.
11. Operasional rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci
  - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
12. Operasional rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo
  - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
13. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
  - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
14. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
  - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
15. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
  - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.

- Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
16. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  17. Operasional rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  18. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  19. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  20. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  21. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  22. Operasional rutin UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitas Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.

## **VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor 1 tahun.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun.

## **VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - Penyediaan Pakaian Dinas untuk ASN Dinas Kehutanan.

## **VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
  - Fasilitasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Aset
  - Pengelolaan Keuangan 1 tahun.
  - Pengelolaan Aset 1 tahun.

## **IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Ikhtisar Kinerja SKPD.
  - Dokumen DPA, Renja, LKJ, Laporan Tahunan Kehutanan, LPPD, DPPA, DIPA, Renstra dan Laporan Kinerja A 8 Dokumen.
  - Rapat Koordinasi 1 Kali.

## 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Kehutanan 1 Dinas dan 12 UPTD.
- Buku Statistik Dinas Kehutanan dan 12 UPTD 1 Buku.

Tabel-C33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pilihan Bidang Urusan Pemerintahan								
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>	<b>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD</b>	Dinas dan UPTD	0,20%	28.117.003.660	APBD		0,20%	22.466.616.715
		<b>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</b>	Dinas dan UPTD	1,58%	-	APBD		1,71%	-
		<b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	Dinas dan UPTD	0,83%	-	APBD		0,83%	-

				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Dinas)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	Dinas	65,00%	210.000.000	APBD		68%	-
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan	Dinas	64,66%	300.000.000	APBD		-	50.000.000
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH		30%	200.000.000	APBD		40%	-
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		40%	-

				Provinsi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)								
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana dan  prasarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP  Unit VIII  Hilir Sarolangun	30%	210.000.000	UPTD KPHP  Unit VIII  Hilir Sarolangun		40%	-
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana  Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		-	-
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana  Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		40%	-

				X)								
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana  Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		40%	-
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana  Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		40%	-
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur XIV)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana  Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		40%	-

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat XV, XVI dan XVII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD		-	-
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Dinas Kehutanan)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	70%	100.000.000	APBD		75%	-
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD		75%	-
					Rencana Pengelolaan Kesatuan	Persentase peningkatan penyediaan data	Dinas	70%	40.000.000	APBD		75%	-

				Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	dukung untuk perencanaan  Operasional KPH						
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan  Operasional KPH	Dinas	-	50.000.000	APBD	-	20.770.393
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan  Operasional KPH	Dinas	-	-	APBD	75%	50.000.000
				Rencana	Persentase	UPTD	-	50.000.000	APBD	-	50.000.000

				Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun						
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD		75%	50.000.000
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD		75%	50.000.000

				XIII)								
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD		75%	50.000.000
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	40%	80.000.000	APBD		45%	80.000.000
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas Kehutanan)	Persentase peningkatan pemanfaatan di Kawasan Hutan	Dinas	50%	2.243.449.240	APBD		50%	1.313.999.100
				Pemanfaatan Hutan di	Jumlah Lokasi pemanfaatan	Dinas	7 Lokasi	147.000.000	APBD		8 Lokasi	186.000.000

				Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	kawasan hutan yang dikelola KPH dan Masyarakat							
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pemanfaatan  Kawasan Hutan	UPTD KPHP  Bungo Unit  II dan III	-	147.000.000	APBD	-	186.000.000	
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan  Operasional KPH	UPTD KPHP Merangin Unit  IV, V dan VI	35%	2.266.000.000	APBD	40%	2.072.000.000	
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitasi pengembangan  perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP  Unit VII Hulu  Sarolangun	40%	148.482.100	APBD	50%	130.000.000	
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan pemanfaatan  potensi sumber daya hutan	UPTD KPHP  Unit VIII Hilir  Sarolangun	50%	830.340.000	APBD	55%	220.300.000	
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan	UPTD KPHP  Tebo Barat	11%	300.000.000	APBD	11%	131.000.000	

				(UPTD KPHP (Tebo Barat Unit IX)	KPH							
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Timur Unit X)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	169.739.450	APBD		55%	130.200.368
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	167.033.000	APBD		53%	122.033.000
				Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	320.000.000	APBD		-	50.000.000
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjung Timur Unit XIV)	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV	47%	235.000.000	APBD		48%	261.000.000
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan	UPTD KPHP	45%	1.655.000.000	APBD		47%	998.000.000

					Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII))	jumlah lahan yang direhabilitasi kerjasama dan jumlah lahan yang Direhabilitasi	Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII						
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas)	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi di luar kawasan hutan	Dinas	24%	475.000.000	APBD		47%	998.000.000
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Kerinci Unit I	Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	652.100.000	APBD		50 Ha	420.900.000
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	778.000.000	APBD		10 Ha	586.800.000
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58%	180.500.000	APBD		5,91%	241.800.000
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Limau Unit	1,70%	188.000.000	APBD		1,90%	406.800.000

				Negara (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)		VI Hulu Sarolangun						
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	UPTD KPHP  Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	230.200.000	APBD		30%	178.900.000
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/ kebun bibit tanaman kehutanan	UPTD KPHP  Tebo Barat Unit IX	30%	333.000.000	APBD		25%	341.800.000
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP  Tebo Timur Unit X	55%	188.000.000	APBD		60%	196.800.000
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP  Batanghari Unit XI dan XII	55%	360.500.000	APBD		60%	395.175.000
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan	UPTD KPHP  Muaro	55%	360.500.000	APBD		60%	395.175.000

					Negara (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	hutan	Jambi Unit XIII						
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI	60%	208.000.000	APBD		70%	216.800.000
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	Dinas	0,83%	3.481.850.000	APBD		0,83%	4.076.542.530
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	729.174.250	APBD		0,83%	761.356.963
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	706.897.650	APBD		0,83%	575.664.463
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP	0,83%	862.424.250	APBD		0,83%	798.914.463

				Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)		Merangin Unit IV, V dan VI						
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	0,83%	628.944.250	APBD		0,83%	630.266.463
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	713.322.500	APBD		0,83%	495.851.000
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	381.797.000	APBD		0,83%	383.400.000
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	297.400.000	APBD		0,83%	469.963.666

					Tebo Timur Unit X)							
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP  Batanghari  Unit XI dan XII	0,83%	477.400.000	APBD	0,83%	620.463.666
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP  Muaro Jambi  Unit XIII	0,83%	555.000.000	APBD	0,83%	727.563.666
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP  Tanjung Timur  Unit XIV	0,83%	872.112.000	APBD	0,83%	1.065.425.666
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP  Tanjung Timur  Unit XIV	0,83%	1.116.297.000	APBD	0,83%	1.063.997.000
					Pelaksanaan	Persentase	Dinas	20%	63.099.100	APBD	20%	69.409.100

				Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dinas)	Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan Pelaksanaan Identifikasi Potensi HHBK							
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan Pemasaran HHBK	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137.500.000	APBD		6 KTH	145.000.000
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	3 KTH	105.000.000	APBD		3 KTH	105.000.000
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHPTanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	-	-	-		-	-
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (Dinas)	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun	Dinas	45%	100.000.000	-		50%	100.000.000

				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218.294.340	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	66%	228.894.640
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Hasil Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	50.000.000
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu legal	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	72.455.000
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Muaro Jambi	60%	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi	63%	100.000.000

				(UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)		Unit XIII			Unit XIII		
				Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas	35%	399.000.000	Dinas	40%	468.220.000
				<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya	Dinas	0,2%	3.185.000.000	Dinas	0,2%	3.508.500.000
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	UPTD Tahura Taman Hutan Raya	55%	1.985.000.000	UPTD Tahura Taman Hutan Raya	60%	2.208.500.000
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Apendix) CITES (Convension on international Trade In Endangared Spaces) Untuk kewenangan	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk kewenangan daerah	Dinas	55%	300.000.000	Dinas	65%	300.000.000

				Daerah Provinsi								
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian alam	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem Penting	Dinas	55%	900.000.000	Dinas		65%	1.000.000.000
				Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang di kelola oleh masyarakat secara optimal	Dinas	20%	7.746.104.340	Dinas		26%	7.946.126.285
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	Dinas	41,62	1.229.600.000	Dinas		50,20%	2.893.800.000
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46%	568.747.355	-		49,06%	668.363.140
				Pelaksanaan Penyuluhan	Persentase Peningkatan	UPTD KPHP	25,26%	1.470.307.465	Bio CF/		33,19%	627.757.820

				Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	Bungo Unit II dan III			APBD		
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45%	1.142.963.865	Bio CF/ APBD	38,05%	423.951.820
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	34,75%	300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	40,25%	300.000.000
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Unit VIII	32,65%	812.134.400	UPTD KPHP Unit VIII	37,45%	744.844.400

				Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	kawasan perhutanan sosial	Hilir Sarolangun						
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85%	280.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX		31,05%	240.000.000
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85%	260.885.255	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X		31,05%	287.357.105
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85%	322.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		31,05%	366.400.000

				Batanghari Unit XI dan XI)							
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85%	300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	31,05%	300.000.000
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85%	287.483.000	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	31,05%	402.806.000
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	27,85%	771.983.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	31,05%	690.806.000
				<b>Program</b>	Persentase lembaga	Dinas	12%	226.894.000	UPTD	15,78%	294.584.000

				<b>Pengelolaan Aliran Daerah Sungai (DAS)</b>	pengelolaan DAS yang Dibentuk				KPHP Tanjung Barat Unit XIV, XV dan XVI			
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS Pendataan Lahan Kritis	Dinas	4 Dokumen	80.000.000	APBD		4 Dokumen	80.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pilihan					
	Bidang Urusan Pemerintahan					
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>	<i>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD</i>	Dinas dan UPTD	0,20%	28.117.003.660	APBD
		<i>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</i>	Dinas dan UPTD	1,58%	-	APBD
		<b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	Dinas dan UPTD	0,83%	-	APBD
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Dinas)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	Dinas	65,00%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan	Dinas	64,66%	300.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	200.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	210.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur XIV)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat XV, XVI dan XVII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Dinas Kehutanan)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	70%	100.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	40.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	-	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	-	-	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD
					(UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)					
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	40%	80.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas Kehutanan)	Persentase peningkatan pemanfaatan di Kawasan Hutan	Dinas	50%	2.243.449.240	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan Masyarakat	Dinas	7 Lokasi	147.000.000	APBD

				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2.266.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitas pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	40%	148.482.100	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	830.340.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Barat Unit IX)	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH	UPTD KPHP Tebo Barat	11%	300.000.000	APBD

				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Timur Unit X)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	169.739.450	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	167.033.000	APBD
				Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitas pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	320.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjab Timur Unit XIV)	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	47%	235.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1.655.000.000	APBD

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas)	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi di luar kawasan hutan	Dinas	24%	475.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	652.100.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	778.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58%	180.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70%	188.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	230.200.000	APBD

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/ kebun bibit tanaman kehutanan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	333.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	188.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	360.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	55%	360.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI	60%	208.000.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	Dinas	0,83%	3.481.850.000	APBD

				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	729.174.250	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	706.897.650	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	862.424.250	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0,83%	628.944.250	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	713.322.500	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	381.797.000	APBD

				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	297.400.000	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	477.400.000	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	555.000.000	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV	0,83%	872.112.000	APBD
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV	0,83%	1.116.297.00 0	APBD
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dinas)	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan Pelaksanaan Identifikasi Potensi HHBK	Dinas	20%	63.099.100	APBD

				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan Pemasaran HHBK	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137.500.000	APBD
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	3 KTH	105.000.000	APBD
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHTanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI	-	-	-
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (Dinas)	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun	Dinas	45%	100.000.000	-
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218.294.340	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Hasil Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu legal	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
					Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas	35%	399.000.000	Dinas
					<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya	Dinas	0,2%	3.185.000.000	Dinas
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	UPTD Tahura Taman Hutan Raya	55%	1.985.000.000	UPTD Tahura Taman Hutan Raya

				Perindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Apendix) CITES (Convension on international Trade In Endangared Spaces) Untuk kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk kewenangan daerah	Dinas	55%	300.000.000	Dinas
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian alam	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dinas	55%	900.000.000	Dinas
				Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang di kelola oleh masyarakat secara optimal	Dinas	20%	7.746.104.340	Dinas
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan social	Dinas	41,62	1.229.600.000	Dinas
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan social	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46%	568.747.355	-

					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26%	1.470.307.465	Bio CF/ APBD
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45%	1.142.963.865	Bio CF/ APBD
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	34,75%	300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65%	812.134.400	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85%	280.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85%	260.885.255	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85%	322.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85%	300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85%	287.483.000	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	27,85%	771.983.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI
					<b>Program Pengelolaan Aliran Daerah Sungai (DAS)</b>	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	Dinas	12%	226.894.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI

					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS Pendataan Lahan Kritis	Dinas	4 Dokumen	80.000.000	APBD
--	--	--	--	--	--	---	-------	-----------	------------	------

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2016 - 2021 sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kinerja yang baru dan benar – benar yang tepat sasaran. Target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicantumkan dalam RPJMN Republik Indonesia dan juga Provinsi Jambi Khususnya Dinas Kehutanan berkaitan dengan Tingkat Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi terutama target capaian penurunan titik api dan peningkatan luas kawasan hutan yang tertutup pohon dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga dengan terwujudnya target capaian tersebut visi dan misi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi dapat diwujudkan.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat diselesaikan secara arif dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* yang lebih baik dimasa mendatang.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016-2021, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui ;

1. Optimalisasi kerjasama internal lingkup kehutanan dan eksternal lintas instansi,
2. Optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta jumlah maupun kemampuan/ profesionalisme SDM bagi upaya pencapaian kinerja sesuai kondisi objektif.

3. Peran serta dari pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan bidang kehutanan

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan guna mewujudkan keberhasilan visi dan misi kedepan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.